

## KATA PENGANTAR

Pembangunan Zona Integritas ini merupakan kesungguhan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dalam mewujudkan komitmen anti korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan ditetapkannya dokumen rencana ini, diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu lebih efektif, efisien, profesional dan akuntabel dalam mendukung visi, misi Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Diharapkan semua pihak dapat menunjukkan komitmen dan keterlibatannya dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini. Besar harapan kami rencana kerja ini dapat dilaksanakan sebaik baiknya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Batu, Januari 2021

Kepala Balai,



Dr. Wasis Sarjono, S.Pt.M.Si  
NIP. 196411131988021001

## PENGESAHAN

Dokumen

### RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

TAHUN 2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

*“Integrity is the essence of everything successful”*

Batu, Januari 2021

Kepala Balai,



Dr. Wasis Sarjono, S.Pt.M.Si  
NIP. 196411131988021001

## BAB I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik berupa pelayanan karantina pertanian, telah menerapkan amanat Undang-Undang No.25 tahun 2009 mengenai Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Seiring dengan tuntutan Standar Pelayanan Publik dan Peraturan terbaru Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka pelayanan prima dan integritas kepada publik menjadi prioritas kebijakan strategis. Instansi pemerintah dituntut untuk menjadi aparat negara yang bersih dan sehat melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat dilakukan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Gaung reformasi birokrasi sudah terdengar selama beberapa tahun terakhir ini, penerapan maupun evaluasi terhadap reformasi birokrasi juga telah dilakukan. Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dalam hal ini telah memenuhi amanat perundangan terkait reformasi birokrasi tersebut. Dengan dukungan sarana prasarana dan sumber daya yang ada, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu senantiasa ingin memberikan pelayanan yang terbaik melalui pencapaian target Balai yang telah ditetapkan diantaranya adalah pencapaian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, penetapan Standar Pelayanan Publik dan

senantiasa mengedepankan kepentingan pengguna jasa. Setelah mendapatkan Sistem Pengendalian Internal award di tahun 2010 dan ditetapkannya Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi. Dalam rangka mempercepat pencapaian target reformasi birokrasi, maka tantangan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu selanjutnya adalah membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

## **I.2 Tujuan**

I.2.1 Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dapat memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014.

I.2.2 Dokumen ini ditujukan sebagai acuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

## **I.3 Manfaat**

Diharapkan dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan referensi mengenai pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

## BAB.II TINJAUAN

### II.1 Profil Organisasi

1. Nama Instansi : Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu
2. Alamat : Jl. Songgoriti No. 24
3. Telepon/Fax : (0341) 591302
4. *e-mail* : ahtc\_batu@pertanian.go.id
5. Website: <http://bbppbatu.bppsdp.pertanian.go.id>

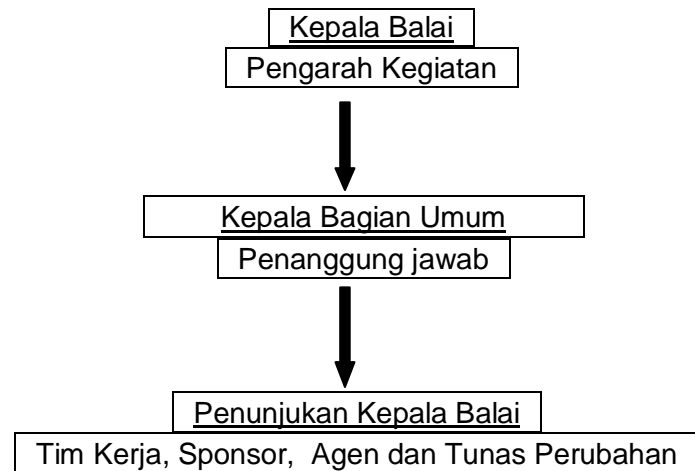
### II.2 Ruang Lingkup

Pelaksanaan komitmen anti korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada publik.

### II.3 Struktur Organisasi

Dalam mengemban amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu menetapkan Struktur Organisasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas tersebut sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.



Mekanisme penunjukan Tim pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan agen perubahan diatur dalam mekanisme penunjukan Tim dan Agen Perubahan

### II.3 Istilah dan Definisi

**II.3.1 Zona Integritas (ZI)** adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang dipimpin dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

**II.3.2 Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ( menuju WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja;

**II.3.3 Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (menuju WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen erubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;

**II.3.4 Instansi Pemerintah** adalah instansi pusat dan instansi daerah;

**II.3.5 Unit Kerja** adalah Unit/satuan kerja di instansi pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;

**II.3.6 Menteri** adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

**II.3.7 Tim Penilai Internal (TPI)** adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/menuju WBBM; dan

**II.3.8 Tim Penilai Nasional (TPN)** adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

#### **II.4 Acuan Normatif**

- 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah
- 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan  
Kementerian Pertanian

- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/OT.210/9/2013 tentang Pengembangan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (Whistle-blower's System) di Lingkungan Kementerian Pertanian
- 4) Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No .27 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian
- 6) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4582/Kpts/OT.160/8/2013 tentang Pembentukan Unit Penggerak Integritas dan Unit Pembangun Integritas Lingkup Kementerian Pertanian
- 7) Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1163/Kpts/OT.160/H/09/2014.



**BAB. III**  
**PEMBANGUNAN ZONA**  
**INTEGRITAS**

**Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas**

Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menetapkan fokus pada pembangunan komponen terkait yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 52 Tahun 2014. Pembangunan komponen pengungkit zona integritas terutama Rencana Kerja sangat penting untuk menjadi pedoman pembangunan menuju WBK/WBBM di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.

**Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM**

Pada Tahun 2021 Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu menyusun dokumen rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dokumen rencana tersebut telah disusun ( Lampiran)
- 2) Dokumen rencana tersebut memuat target yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- 3) Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu mempunyai prosedur dalam mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menujuWBK/WBBM.
- 4) Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dalam memantau dan mengevaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 5) Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan ZI dan dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan
- 6) Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Monitoring dan evaluasi dilakukan menggunakan formulir monitoring dan evaluasi serta dilakukan pengecekan pada kerangka acuan kerja yang telah dibuat
- 7) Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

## **BAB IV. PENUTUP**

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu ditetapkan sebagai kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.60 tahun 2012 junto Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.52 tahun 2014 yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Kajian terhadap penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM perlu terus dilakukan menuju terciptanya aparatur negara yang bersih sesuai cita-cita reformasi birokrasi.

**RENCANA KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM  
TAHUN 2021**

<b>Ref</b>	<b>Area pengungkit</b>	<b>No</b>	<b>Detail Kegiatan</b>	<b>Target/Output</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Target Partisipan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	<b>1</b>	Rapat Umum Pegawai	Internalisasi Tupoksi, Fokus Program dan Kegiatan 2020	KBU	Seluruh pegawai dan Pimpinan	Minggu I Januari 2021
		<b>2</b>	Penandatanganan Pakta Integritas pegawai .	Dokumen Pakta Integritas	Tim ZI	Seluruh pegawai dan Pimpinan	Minggu ke 2 Januari 2021
		<b>3</b>	Pemasangan Banner dan Media Zona Integritas dan Budaya	Kesadaran	Tim IT	Pengguna jasa dan Seluruh Pegawai	April 2021
		<b>4</b>	Pelatihan ISO 37001:2017 Anti penyuapan	Pemahaman Sistem Management Anti Penyuapan (SMAP)	KBU	Pengguna jasa dan Seluruh Pegawai	Juli 2021

Ref	Area pengungkit	No	Detail Kegiatan	Target/Output	Penanggung Jawab	Target Partisipan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8
		5	Berantas Anti Pungli dan infografis inovasi - Website - Benner	perilaku dan sebar informasi ke masyarakat luas			
		6	Monitoring dan Laporan Evaluasi kegiatan	Hasil monitoring dan evaluasi yang akan digunakan sebagai tindak lanjut	Tim ZI	Unit Kerja dan Koordinator Operasional	Bulanan
2	<b>PENATAAN TATA LAKSANA</b>	9	Menerapkan Sistem Informasi Digital untuk Pengguna jasa layanan Pelatihan  Penerapan LMS	Kepuasan, transparansi dan kemudahan pengguna Jasa Media Pembelajaran secara online	Tim IT	Pengguna jasa dan Petugas Layanan	Januari 2021-Maret 2021
		10	Sosialisasi	Penjelasan tentang Tusi untuk internal dan masyarakat pengguna jasa	Tim ZI  Organisasi Pelayanan	Seluruh pegawai	Februari 2021

Ref	Area pengungkit	No	Detail Kegiatan	Target/Output	Penanggung Jawab	Target Partisipan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>MANAJEMEN SDM</b>	11	Melakukan Rotasi tugas pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Data Pengembangan kompetensi pegawai	Struktural, Analis Kepegawaian	Pegawai	Januari 2021
		12	Membuat Standar kompetensi Pemetaan Analisa Kebutuhan dan Rencana pengembangan kompetensi SDM	Tersedia data kebutuhan dan kompetensi pegawai sesuai berdasarkan bobot nilai	Analis Kepegawaian	Analis Kepegawaian	Pebruari 2021
		13	Mengadakan pelatihan internal In house Training untuk meningkatkan kompetensi pegawai teknis dan non teknis	Mengupgrade pegawai dengan kompetensi tertentu	Analis Kepegawaian dan Korfung	Pegawai yang terdaftar	Maret, Juli, dan Agustus 2021

		14	Mengevaluasi pengisian SKP pegawai	Meningkatkan ketertiban administrasi kegiatan pegawai	Analisis Kepegawaian dan IT	Seluruh pegawai	Juni 2021
4	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	16	Melakukan evaluasi atas dokumen Rencana Kerja, Indikator Kinerja dan Perjanjian Kinerja	Tersedianya dokumen perencanaan	Tim ZI Perencanaan	Tim Perencanaan	April – Juni 2021
		17	Melakukan monitoring Akuntabilitas Kinerja Anggaran	Tersedia laporan Kinerja Anggaran kegiatan secara Online	Tim IT Keuangan dan Perencanaan	Penanggung jawab kegiatan	Januari 2021
5	<b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>	18	Penandatanganan Pakta Integritas bersama pengguna Jasa dan Mitra Kerja	Pengendalian anti Gratifikasi dan operasional yang efektif	Koordinator Fungsional TIM UPG	Pengguna jasa	Februari 2021

Ref	Area pengungkit	No	Detail Kegiatan	Target/Output	Penanggung Jawab	Target Partisipan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8
		19	Pelaksanaan dan Pernyataan Bulan Anti Gratifikasi di BBPP Batu	Pengendalian anti Gratifikasi yang efektif	Koordinator Fungsional Tim UPG	Pegawai fungsional dan pengguna jasa	Juli 2021
		19	Sosialisasi Tugas pokok Tim Saber Pungli ,Benturan Kepentingan dan WBS untuk pegawai	Pemahaman Gratifikasi, Benting dan WBS	Wasdak, Tim ZI dan Tim UPG	Seluruh pegawai	Agustus 2021
6	<b>PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b>	20	Pengelolaan standar pelayanan Publik dan media pendukungnya	Standar Pelayanan yang memenuhi syarat	Tim SPP dan IT	Pengguna jasa	Februari 2021
		21	Menyusun katalog SPP Bersama stake holder dan pengguna jasa	Bahan public hearing	Tim SPP	Stake holder dan pengguna jasa	Februari 2021



Ref	Area pengungkit	No	Detail Kegiatan	Target/Output	Penanggung Jawab	Target Partisipan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8
		21	Melakukan review dan Kesepakatan ulang dengan stake holder atas dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP) dan maklumat layanan	Berita Acara Kesepakatan yang baru dengan stake holder yang berhubungan dengan Pelayanan Publik	Tim SPP	Stake holder dan pengguna jasa	Februari 2020
		22	Menampilkan Survey kepuasan secara terbuka dan interaktif dan dipublikasikan secara transparan di website satuan kerja	Kemudahan pengguna jasa memantau dan memberikan masukan atas kualitas pelayanan	Tim IT Unit Pelayanan	Pengguna jasa	Maret 2020

Batu Januari 2021  
Kepala Balai,



Dr. Wasis Sarjono, S.Pt.M  
NIP. 196411131988021001

